

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang.

Salah satu ukuran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Ukuran pendapatan nasional yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun) (BPS, 2007:2). Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. Apabila PDRB-nya menunjukkan adanya peningkatan, maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Kecil

Menengah (UKM) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor usaha yang lebih besar (UB) justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu mengalami bangkrut karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap eksis, bahkan cenderung bertambah.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Peran penting UKM secara umum dapat kita lihat dari perkembangan yang signifikan dan peran UKM sebagai penyumbang PDRB terbesar di

Indonesia. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012 menunjukkan peningkatan jumlah PDRB UKM dari Rp. 2,107,868.10 Milyar menjadi Rp. 4,869,568.10 Milyar atau rata-rata mengalami perkembangan sebesar 18.33%/tahun. Kemudian pada Usaha Besar (UB) sumbangsih terhadap perkembangan PDRB lebih sedikit dibandingkan UKM, dengan Persentase rata-rata perkembangan sebesar 15.75% pertahun. Dari data statistik yang yang diperoleh dari BPS, pada tahun 2012 UKM menyerap 97,16% dari total tenaga kerja Industri di Indonesia atau sebesar 107.66 juta, sisanya atau sebesar 2.84% tenaga kerja diserap oleh sektor Usaha Besar (www.lisubisnis.com).

Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 % dari total jumlah unit usaha. UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja. Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 %. Kemudian sumbangan UKM terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 % dari total nilai ekspor. Sampai saat ini perekonomian Indonesia mayoritas ditopang oleh sektor ini. Setidaknya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut mampu menyerap sekitar 70 % tenaga kerja informal. Sisanya, 30 % bergerak di bidang formal. UMKM juga telah menyumbang produk ekspor sampai 16 %.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran UKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga pemberdayaan UKM merupakan sesuatu yang penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sektor usaha mikro kecil dan menengah ini perlu

dibina dan diberdayakan, karena merupakan penggerak perekonomian dan pengembang ekonomi kerakyatan. Potensi itu terlihat tahun 2017, UKM telah menyerap sebanyak 42,4 juta unit usaha dan 79 juta tenaga kerja dengan 56,7 % dari PDB nasional.

Kajian empiris tentang pengaruh perkembangan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan Hanum (2010) yang menyimpulkan bahwa UKM menjadi salah satu sektor terpenting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil berbeda didapatkan Senja (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel tenaga kerja UKM dan nilai ekspor UKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun variabel jumlah unit UKM dan nilai investasi UKM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Begitu juga hasil penelitian Hapsari, dkk (2014) menyimpulkan bahwa variabel jumlah UKM dan tenaga kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk variabel Modal UKM dan Laba UKM ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bagaimana peran UKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga pemberdayaan UKM merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sumbangsih UKM terhadap PDRB menjadikan indikator pentingnya UKM dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator pertumbuhan perekonomian, dimana pertumbuhan

ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka yang panjang. *Output* per-kapita sekarang ini kita kenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri sangat berkaitan erat dengan jumlah penduduk sehingga PDRB sangat dipengaruhi jumlah penduduk dan jangka waktu yang panjang, jadi per-tumbuhan ekonomi merupakan suatu proses.

Nilai PDRB Kabupaten Jepara pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2006 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 5,677,316.96, mengalami peningkatan pada tahun 2007 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 6,468,910.34, mengalami peningkatan pada tahun 2008 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 7,455,878.02, mengalami peningkatan pada tahun 2009 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 8,206,221.97, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2010 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 9,118,487.15, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 14,004,330.00, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 14,825,000.00, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 15,623,740.00, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 16,374,720.00, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 17,200,370.00, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 18,063,130.00.

Tabel. 1.1
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara
 Perkapita Tahun 2006 -2016

Tahun	PDRB Kabupaten Jepara			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2006	5,677,316.96	5,677,316.96	5,677,316.96	5,677,316.96
2007	6,468,910.34	6,468,910.34	6,468,910.34	6,468,910.34
2008	7,455,878.02	7,455,878.02	7,455,878.02	7,455,878.02
2009	8,206,221.97	8,206,221.97	8,206,221.97	8,206,221.97
2010	9,118,487.15	9,118,487.15	9,118,487.15	9,118,487.15
2011	14,004,330.00	14,004,330.00	14,004,330.00	14,004,330.00
2012	14,825,000.00	14,825,000.00	14,825,000.00	14,825,000.00
2013	15,623,740.00	15,623,740.00	15,623,740.00	15,623,740.00
2014	16,374,720.00	16,374,720.00	16,374,720.00	16,374,720.00
2015	17,200,370.00	17,200,370.00	17,200,370.00	17,200,370.00
2016	18,063,130.00	18,063,130.00	18,063,130.00	18,063,130.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 11 tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai 2016 setiap tahunnya memiliki pergerakan yang signifikan, dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Uraian di atas mengungkapkan bahwa Pengembangan dunia usaha di Kabupaten Jepara tidak bisa dilepaskan dari peranan dunia usaha yang sudah ada, baik skala kecil maupun skala besar. Jumlah dunia usaha yang semakin banyak dan keberadaannya tersebar luar keseluruhan wilayah, sekalipun distribusinya terkadang ditemui beberapa kendala. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik ditunjang oleh produktifitas yang tinggi. Setiap Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Kabupaten Jepara menjadi salah satu kota yang menarik dan berpotensi untuk pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. Pengembangan UKM dan sektor pariwisata akan mempengaruhi secara signifikan peningkatan perekonomian baik individu maupun keseluruhan (PAD) Kabupaten Jepara. Sebab, peranan UKM sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi rakyat, UKM memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh Departemen Koperasi dan UKM. Beberapa penyebab laju pertumbuhan ekonomi membaik tetapi tidak memperbaiki peningkatan kesempatan kerja adalah; *Pertama*, sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi umumnya berasal dari konsumsi masyarakat dan pemerintah, bukan berasal dari peningkatan kapasitas perekonomian. *Kedua*, kebijakan politik berasal dari probisnis menjadi proburuh. Hal ini mengakibatkan pasar tenaga kerja menjadi *rigid* dan menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja relatif terhadap faktor

produksi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dimasa mendatang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Keadaan ini akan terwujud jika penyimpangan yang menyebabkan peningkatan rasio upah terhadap biaya produksi lainnya meningkat.

Peranan UKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sangat penting. Faktanya terdapat ketidak-seimbangan antara sumbangan UKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah. Pertumbuhan UKM yang lebih cepat dibandingkan kelompok usaha besar akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan. Secara sektoral UKM memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan sektor pertambangan dan penggalian. Penciptaan nilai tambah UKM di masing-masing sektor tersebut selalu meningkat terutama sektor andalan UKM yakni sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Berbeda dengan sektor industri pengolahan yang peningkatan nilai tambahnya tidak terlalu meningkat tajam.

Dilihat dari kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Jepara, UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat

dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan UKM, peran dari sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. Aturan main bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.

Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan *cluster*, jaringan bisnis, dan

kompetisi. UKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataanya UKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain. Strategi UKM adalah kemitraan dan bantuan keuangan, perlu penelitian yang berkaitan dengan UKM yang diharapkan dapat membantu dan mengatasi persoalan permasalahan dalam UKM sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Peranan UKM dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara yaitu diindikasikan dengan pertumbuhan PDRB UKM. Pertumbuhan PDRB UKM dipengaruhi oleh beberapa variabel yang berkaitan dengan perkembangan UKM yang terdiri dari:

1. Jumlah unit UKM.
2. Jumlah omset peredaran usaha.
3. Jumlah total asset UKM.
4. Jumlah tenaga kerja UKM.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan penelitian, yakni: variabel perkembangan UKM yang terdiri dari jumlah unit UKM, jumlah omset peredaran usaha UKM, jumlah total asset UKM dan jumlah tenaga kerja UKM. Dengan melihat pengaruhnya terhadap PDRB Kabupaten Jepara pada sektor UKM dari tahun 2006 sampai 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pengujian teori tentang pengaruh perkembangan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada sektor UKM, yang dalam hal ini terfokus pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pengaruh jumlah omset peredaran usaha UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pengaruh total asset UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara?
4. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh jumlah unit UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis pengaruh jumlah omset peredaran usaha UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara.
3. Menganalisis pengaruh total asset UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara.

4. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam hal perkembangan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi para aparat pemerintahan, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan dalam mengembangkan sektor UKM.
2. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya UKM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan sektor UKM.